

MANAJEMEN ANGGARAN KAS DAERAH

Andri Syam Putra dan Dadang Mashur

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Service Quality and Customer Satisfaction. This study aimed to analyze the influence factors of service quality consisting of factor reliability, assurance, tangible, empathy, responsiveness to customer satisfaction, either simultaneously (synchronously) or partially and to determine which of the factors of service quality have most dominant influence on customer satisfaction in Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan. Sample of 100 respondents from the overall customer savings Tabungan Sinar at Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan personality as much as the population of 6,240 people and the data using linear regression analysis. The results show that simultaneous statistical test service quality factors consisting of reliability, assurance, tangible, empathy and responsiveness have significant influence on customer satisfaction. Partial statistical tests indicate that the variable reliability (X1) and empathy (X4) has a significant impact on customer satisfaction and empathy factors (X4) gives the most dominant influence on customer satisfaction.

Abstrak: Implementasi Manajemen Anggaran Kas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan dampak pelaksanaan manajemen anggaran kas mengenai kas menganggur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan metode campuran (konklusi) adalah karena dalam penelitian ini penulis mempunyai data kuantitatif dan kualitatif. Kedua data tersebut saling melengkapi. Hasil penelitian menunjukkan dampak manajemen anggaran kas terhadap penerimaan daerah telah memberikan kontribusi bunga deposito terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 15,64%. Pendapatan tersebut diupayakan sebagai pembayaran belanja daerah atau sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Kata Kunci: kualitas pelayanan, kepuasan nasabah, pengaruh, simultan

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah umumnya memiliki sumber daya yang terbatas atau relatif sedikit untuk menghadapi tantangan dan persaingan global. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan dari daerah sendiri diharapkan dapat membantu dan memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat. Hal ini akan menunjukkan bahwa kemandirian dan otonomi daerah dapat dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Pendapatan Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan kenaikan dan penurunan realisasi total secara rata-rata dari tahun anggaran 2006 s/d 2010 adalah sebesar 6, 20%. Peran dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada setiap tahunnya berkisar rata-rata 20,90% terhadap total pendapatan APBD sedangkan pada pos transfer dana pusat-dana perimbangan dan pos lain-lain pendapatan yang sah masing-masing

96,26% dan 0.56%. Kemudian pos PAD mendapat catatan khusus untuk membenahi sektor ini, karena persentase kenaikan dan penurunan belum menjanjikan rata-rata 3,00%. Malah dari data yang diperoleh mengindikasikan besarnya tingkat ketergantungan PAD Kabupaten Rokan Hulu terhadap dana transfer pemerintah pusat dan dana perimbangan. Karena itu pemerintah daerah berupaya menciptakan salah satu cara peluang dalam upaya peningkatan PAD. Apabila dikaitkan dengan keberhasilan otonomi daerah ternyata peran sumber daya alam merupakan marwah suatu daerah. Namun dana yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan tidak kekurangan pada saat dibutuhkan.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan manajemen anggaran, Silpa harus dikelola semaksimal mungkin untuk pelaksanaan pembangunan dan jalannya pemerintahan. Tersedianya Silpa dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan atau program pembangunan. Meskipun

pada periode-periode tertentu jumlah belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan, namun adanya kas pemerintah yang disetorkan ke bank umum menyebabkan adanya sisa anggaran dalam bentuk Silpa setiap periode anggaran seperti tahun 2007 dengan total pendapatan sebesar Rp.714.195.807.298,80 sedangkan belanja mencapai Rp.859.790.055.994,00. Berdasarkan perhitungan Laporan Realisasi Anggaran tahun yang sama masih ada Silpa sebesar Rp.257.249.160.848,00.

Membaca data di atas, selain mengindikasikan tingginya ketergantungan Kabupaten Rokan Hulu terhadap dana dari pemerintah pusat, juga dapat diasumsikan belum maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber PAD itu sendiri. Akibatnya biaya pembangunan dan pengeluaran daerah diambil dari Silpa pada tahun-tahun sebelumnya yang berada dalam kas daerah yang “dititipkan” pada bank umum yang berada di daerah. Besaran Silpa yang berfluktuasi setiap tahunnya memungkinkan pemerintah daerah mengelola dan mengembangkan potensi Silpa yang ada. Sedangkan dari sisi belanja dan pengeluaran, Kabupaten Rokan Hulu pada tahun yang sama adanya fluktuasi pengeluaran (dari sektor belanja daerah) yang cenderung mengakibatkan defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi pada tahun 2007, 2009, dan 2010. Hal ini disebabkan tingginya belanja daerah dibandingkan dengan total pendapatan APBD, sedangkan pada sisi pembiayaan daerah terjadi surplus anggaran. Ini disebabkan adanya sumber penerimaan pembiayaan daerah seperti penggunaan Silpa tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2009, di mana dengan kondisi keuangan daerah yang ada, daerah berhak menggunakan sumber-sumber pendapatan untuk melaksanakan biaya pembangunan dari sumber-sumber pendapatan lain yang dikelola daerah. Dengan pernyataan yang lebih sederhana, ketersediaan

anggaran (yang tidak bersumber dari dana pusat) dapat dipergunakan sesuai kebutuhan dan kepentingan daerah melalui pengelolaan sendiri atas sumber-sumber pendapatan daerah.

Asumsi adanya perencanaan yang tidak matang, tidak tepat sasaran, dan pelaksanaan dari program/kegiatan yang tidak berdasarkan prioritas, serta peran masyarakat yang masih kurang mengontrol pemerintah daerah akan menimbulkan pemborosan anggaran dan dampak tidak baik demi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan pembangunan yang jauh dari tujuan. Sementara kemampuan peningkatan keuangan dari sisi PAD sangat memprihatinkan dan harus dikelola perlu dikelola dengan baik. Demikian juga halnya dengan pengeluaran atau belanja daerah. Dengan kata lain pengelolaan sumber daya dan potensi PAD yang belum maksimal, pemerintah daerah mampu melaksanakan pembangunan daerah dengan optimal.

Selain itu, beberapa data menunjukkan Kabupaten Rokan Hulu masih rendah dalam prinsip pengelolaan keuangan daerah. Beberapa faktor yang dianggap sebagai dasar sehingga pemerintah daerah mengeluarkan suatu kebijakan dimaksud adalah diasumsikan sebagai berikut:

1. Potensi sumber penerimaan daerah masih minim untuk mendongkrak jumlah PAD.
2. Pelaksanaan anggaran yang kurang efektif dan efisien.
3. Perhitungan SILPA pada akhir tahun anggaran cukup tersedia/signifikan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan teknis pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan sisa anggaran yang ditempatkan pada bank umum (kas daerah) dengan ketentuan bahwa pengelolaan uang kas daerah dapat dipergunakan. Pemerintah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan publik memiliki dua fungsi yang berbeda, yakni fungsi politik dan fungsi administratif. Fungsi politik terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, sedangkan fungsi administrasi terkait dengan fungsi pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai lembaga pembuat dan pelaksana ke-

bijakan publik memiliki kekuatan diskriptif (*disrectionary power*) dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena itu, aktor-aktor lain juga harus memainkan peran pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang cukup penting dari kegiatan pemerintahan termasuk juga dalam kegiatan pemerintah daerah. Sesuai dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, misi utama dari pengelolaan daerah adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002), secara garis besar, manajemen keuangan daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dan dampak pelaksanaan manajemen anggaran kas mengenai kas menganggur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan metode campuran (konklusi) adalah karena dalam penelitian ini penulis mempunyai kedua data ini yang saling melengkapi. Pada data kuantitatif menampilkan hasil berupa angka-angka yang terangkum dalam tabel dan dapat mengukur frekwensi kecenderungan sikap, sedangkan data kualitatif bertujuan melengkapi data kuantitatif yang dilakukan melalui wawancara yang menghasilkan kata-kata/ Pernyataan dari partisipan dalam penelitian.

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan angket skala sikap, yang berupa pertanyaan yang didistribusikan untuk diisi dan dikembalikan atau dapat juga dijawab di bawah

pengawasan peneliti. Pemilihan teknik ini didasarkan atas alasan bahwa: 1) responden memiliki waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. 2) setiap responden menghadapi susunan dengan cara pengisian yang sama atas pertanyaan yang diajukan. 3) responden mempunyai kebebasan memberikan jawaban. 4) dapat digunakan untuk pengumpulan data atau keterangan dari banyak responden dalam waktu yang tepat. Untuk mendapatkan data atau hasil sehubungan dengan permasalahan penelitian (tidak berhubungan dengan skala sikap), maka penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sering disebut dengan metode etnografik, fenomenologis atau metode naturalistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sudah dijalankan dengan sangat baik. Pelaksanaan Peraturan Bupati sebagai sebuah kebijakan, sebagaimana yang dikemukakan Edwards III (2003) sudah didukung oleh beberapa faktor, di antaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Untuk implementasi Peraturan Bupati diperoleh total skor tanggapan responden adalah 1.753. Jika nilai tertinggi dari 26 pernyataan adalah 2.080, maka persentase skor tanggapan responden adalah 84.28 %. Berdasarkan kategorisasi variabel implementasi kebijakan, nilai 1.753 dengan persentase 84.28 % berada pada interval 1.752 – 2.080 atau 81 %-100 %, termasuk pada kategori sangat baik. Kategori sangat baik ini dipengaruhi oleh beberapa kondisi di mana; komunikasi yang dibangun dalam rangka pelaksanaan kebijakan sudah dijalankan dengan optimal, didukung oleh sumber daya yang memadai, adanya disposisi yang jelas dan dukungan pembuat kebijakan serta struktur birokrasi yang mendukung.

Salah satu faktor kunci pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuannya dalam mengelola kas. Manajemen kas menurut Mahmudi (2010) sendiri terkait dengan keputusan: 1) bagaimana memanfaatkan kas menganggur

atau belum dipakai hingga waktu tertentu, 2) instrumen investasi apa yang dapat dipilih, 3) bagaimana menentukan portofolio investasi yang optimal, 4) jika memang diperlukan kapan harus mengadakan hutang, dan 5) kapan harus melakukan pengeluaran dan berapa besarnya.

Konteks implementasi yang dikemukakan oleh Grindle merupakan salah satu bentuk dari keberhasilan implementasi itu sendiri (Manajemen Anggaran Kas) yang terdiri dari kepatuhan dan responsivitas dari kelompok sasaran. Kepatuhan dalam penelitian ini, diantaranya kepatuhan petugas lapangan dan kelompok sasaran (bank umum tempat menipikan dana).

Keberhasilan manajemen anggaran kas sudah berjalan dengan sangat baik dapat dibuktikan sebagaimana perhitungan skala Likert, di mana total skor tanggapan responden adalah 355. Jika nilai tertinggi dari tanggapan 26 responden terhadap lima pernyataan keberhasilan manajemen anggaran kas adalah 400, maka persentase skor tanggapan responden adalah 88.75 %

Berdasarkan kategorisasi variabel keberhasilan manajemen anggaran, nilai 355 dengan persentase 88.75 % berada pada interval 340 – 400 atau 81 %-100 %, termasuk pada kategori sangat baik. Kondisi ini dibuktikan dengan terjaganya kepatuhan pelaksana tugas terhadap prosedur yang telah disepakati. Kepatuhan kelompok sasaran dalam mengelola *idle cash* melalui investasi jangka pendek dalam bentuk deposito serta kepatuhan bank dengan jalan memberikan jaminan ketersediaan dana kas, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2007), salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuan pejabat pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam mengelola kas daerah. Kas daerah yang dimaksud adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. BUD perlu memiliki mekanisme manajemen kas yang baik sehingga dapat meng-

optimalkan kas daerah yang ada. Manajemen kas ini berkaitan dengan pemanfaatan kas yang masih menganggur atau belum akan dipakai hingga waktu tertentu, instrumen Investasi yang dipilih dan penentuan portofolio investasi yang optimal. Investasi yang dimaksud di sini adalah kegiatan menempatkan uang dalam portofolio investasi seperti deposito, Surat Utang Negara, saham atau instrumen portofolio investasi lainnya. Kegiatan inilah yang mampu mengoptimalkan pendapatan daerah karena pemerintah daerah akan memperoleh bunga/jasa giro/bagi hasil atas dana yang disimpan melalui portofolio investasi tersebut. Pokok perhatian manajemen kas adalah bagaimana memperoleh penerimaan dana kas daerah secepat mungkin, mengeluarkan dana untuk membayar pengeluaran daerah seefisien mungkin dan memanfaatkan seefektif mungkin dana kas daerah yang belum digunakan.

Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan pedoman terhadap kegiatan investasi ini tercantum dalam pasal 70 yang berbunyi: Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) huruf b digunakan untuk mengelola kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dari pasal ini dapat dijelaskan bahwa pemerintah dapat mengelola kekayaan daerahnya untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal melalui investasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjual belikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan resiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 bulan. Sedangkan investasi jangka panjang digunakan untuk menampung penganggaran investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

PP Nomor 39 Tahun 2007 memberikan pedoman tentang strategi manajemen kas. Pada pasal 3 disebutkan strategi manajemen kas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dilaksanakan oleh BUD harus dapat memastikan: a)

Pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban daerah; dan/atau b) Saldo kas diatas saldo minimal diarahkan untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Pasal ini memberikan ruang bagi pengelola keuangan daerah untuk mengelola kelebihan kasnya dengan menempatkan uang daerah pada portofolio investasi/penempatan dana untuk memperoleh keuntungan.

Dampak pengelolaan anggaran kas daerah melalui pengelolaan *idle cash* pada beberapa bank umum tahun 2010 diperoleh bunga deposito sebesar Rp. 4,358,645,203.00. Jika dibandingkan dengan realisasi PAD pada tahun yang sama (sebesar Rp. 27,862,342,362.00), maka diperoleh kontribusi bunga deposito terhadap PAD adalah sebesar 15.64 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran (manajemen anggaran) sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2009 memberikan dampak bertambahnya/meningkatnya PAD untuk tahun anggaran 2011, karena ada penambahan pendapatan berupa bunga deposito dari pengelolaan *idle cash*. Pendapatan tersebut dapat digunakan sebagai pembayaran belanja daerah atau sebagai sumber pembiayaan. Selain itu dampak yang ditimbulkan juga akan semakin besarnya animo para pemilik modal (pengusaha) untuk berinvestasi karena sumber dana yang dimiliki daerah dapat menjamin iklim investasi melalui pelaksanaan program pembangunan, baik sarana maupun infrastruktur yang mendukung.

Anggaran kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini untuk menjamin ketersediaan dana pada saat dibutuhkan, sehingga melaksanakan program/kegiatan yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan publik dan pemerintahan dapat berjalan lancar seperti yang direncanakan, sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan target kinerja. Penyusunan anggaran kas bagi pemerintah daerah berguna untuk mengetahui keadaan kas yang ada secara lebih pasti, apakah surplus atau defisit. Jika surplus dapat memanfaatkan surplus tersebut dan jika defisit dapat memperkirakan sumber penutupan

defisit. Menurut Riyanto (1982) manfaat anggaran kas adalah:

1. Kemungkinan posisi kas sebagai hasil rencana operasi perusahaan.
2. Kemungkinan adanya surplus atau defisit karena rencana operasi perusahaan.
3. Besarnya dana beserta saat-saat kapan dana itu dibutuhkan untuk menutup defisit kas, kapan saat kredit itu dibayar kembali.

Sedangkan tujuan anggaran kas menurut Martono, dkk (2004) adalah:

1. Membuat taksiran posisi kas pada setiap akhir periode dari kegiatan operasi perusahaan baik periode bulanan atau tahunan.
2. Mengetahui adanya kelebihan atau kekurangan kas yang terjadi pada periode tertentu.
3. Merencanakan besarnya kas untuk menutup defisit.
4. Menentukan besarnya kas untuk pembayaran dan kelebihan kas untuk investasi.
5. Mengetahui kapan suatu pinjaman atau kewajiban lainnya harus dibayar.

Pelaksanaan anggaran kas pada pemerintah daerah membutuhkan informasi-informasi di antaranya: a) Saldo arus kas yang merupakan kas pada awal tahun anggaran yang juga saldo akhir dari tahun anggaran sebelumnya, saldo ini juga merupakan Silpa; b) Proyeksi penerimaan kas yang didasarkan pada jumlah penerimaan tahun sebelumnya secara *time series* serta memprediksi kemungkinan meningkatnya jumlah penerimaan dari pos-pos tertentu; dan c) Proyeksi pengeluaran yang didasarkan pada jumlah pengeluaran tahun sebelumnya secara *time series* serta memprediksi kemungkinan meningkatnya jumlah pengeluaran dari pos-pos tertentu.

SIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan tentang implementasi sudah berjalan sangat baik. Hal ini terbukti dengan isi, tujuan, arah, informasi kebijakan sudah sangat baik. Pelaksanaan kebijakan sudah terdiri dari tenaga terampil, berdedikasi, penggunaan anggaran sesuai prosedur, didukung oleh sarana yang maksimal, prasarana pendukung

memadai, kebijakan didukung informasi yang relevan. Pelaksana kebijakan bersikap baik dan sopan, pelaksana kebijakan antusias dalam melaksanakan tugas, mendapat perhatian khusus dari pembuat kebijakan. Dampak manajemen anggaran kas terhadap penerimaan daerah telah memberikan kontribusi bunga deposito terhadap peningkatan PADA sebesar 15,64%. Pendapatan tersebut diupayakan sebagai pembayaran belanja daerah atau sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: Ikatan Akuntan Publik Indonesia
- Bratakusumah, Supriady Dedy dan Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Edward G. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumaryadi, Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik*. Bandung: Mandar Maju
- Widodo, M.S, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo